LAPORAN KINERJA

BPHL WILAYAH XII

TAHUN 2022

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII
PALU, JANUARI 2023

LAPORAN KINERJA

BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

WILAYAH XII

TAHUN 2022

BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII

JANUARI 2023

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja sebagai ikhtisar capaian kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XII yang dahulu bernama Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XII, memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Kinerja dimaksud tidak terbatas pada pencapaian di tahun 2022 namun juga mengevaluasi dan mengkomparasi hasil kerja di tahun-tahun sebelumnya yang masih terkait dengan kondisi saat ini.

Adanya kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) turut mengubah struktur Laporan Kinerja Tahun 2022, dimana Balai tidak lagi mempunyai target IKK, sehingga pengukuran dan evaluasi kinerja Balai didasarkan pada capaian target Rincian Output (RO) sebagaimana termuat dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang disepakati bersama oleh Kepala BPHL Wilayah XII dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Kiranya Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dalam upaya mewujudkan pelaporan yang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif (Ber-Akhlak).

Palu, Januari 2023

Kepala BPHL Wilayah XII,

Elbakti, S.Hut., M.Sc
NIP. 1 97405041993011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR INFOGRAFIS iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR LAMPIRAN vii
BAB 1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 4
C. Struktur Organisasi 5
D. Maksud, Tujuan dan Sistematika Penyajian 6
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Kerja 2022 7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 8
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi 12
B. Realisasi Anggaran 21
C. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 25
BAB 4. PENUTUP
A. Kesimpulan dan Saran 27

LAMPIRAN

DAFTAR INFOGRAFIS

1. Pemetaan Luas Kawasan Hutan di wilayah kerja BPHL Wilayah XII
2. Petikan DIPA halaman IV.A (blokir AA tahap I)
3. Petikan DIPA Halaman IV.A (blokir AA Tahap II)
4. **Proses Bisnis BPHL sesuai Permen LHK No.16 tahun 2022**
5. Distribusi Pegawai BPHL Wilayah XII Menurut Jenis Kelamin, Golongan, Eselonisasi dan Tingkat Pendidikan
6. Nilai SMART menurut data SmartDJA tanggal 12 Januari 2022

DAFTAR TABEL

1. Perjanjian Kinerja BPHL Wilayah XII Tahun 2022
2. MATRIKS Cascading IKP, IKK, RO LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PHL
3. Rincian Realisasi per RO BPHL Wilayah XII Palu Tahun 2022
4. Pencapaian Kinerja RO Tahun 2022 sesuai laporan SmartDJA
5. Perbandingan Realisasi Capaian target RO Tahun 2021 dan 2022
6. Monitoring Revisi Realokasi Anggaran BPHL Wilayah XII Tahun 2022
7. Realisasi Anggaran BPHL Wilayah XII Per Jenis Belanja Tahun 2022 (data OMSpan 12 Januari 2023)
8. Perbandingan Realisasi Per Jenis Belanja Tahun 2021 dan Tahun 2022

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari
2. Pengemasan produk HHBK ArenGo
3. Penanaman tanaman argofestry jahe
4. Kegiatan Internalisasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
2. Sertifikat Peringkat I Unit Kerja Kategori Memadai dalam Penyusunan Desai SPIP Lingkup Ditjen PHL Kementerian LHK
3. Sertifikat KPH Efektif KPHP Unit VI Gorontalo
4. Sertifikat KPH Efektif KPHP Unit V Boalemo
5. Sertifikat KPHP Unit IV Gorontalo Utara

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 tahun 2022, BPHL mempunyai tugas untuk melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wilayah kerja BPHL Wilayah XII meliputi 3 provinsi yakni Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas kawasan hutan sesuai SK. Nomor : SK. 6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 sebagaimana dipetakan di bawah ini :

Infografis 1. Pemetaan Luas Kawasan Hutan di wilayah kerja BPHL Wilayah XII

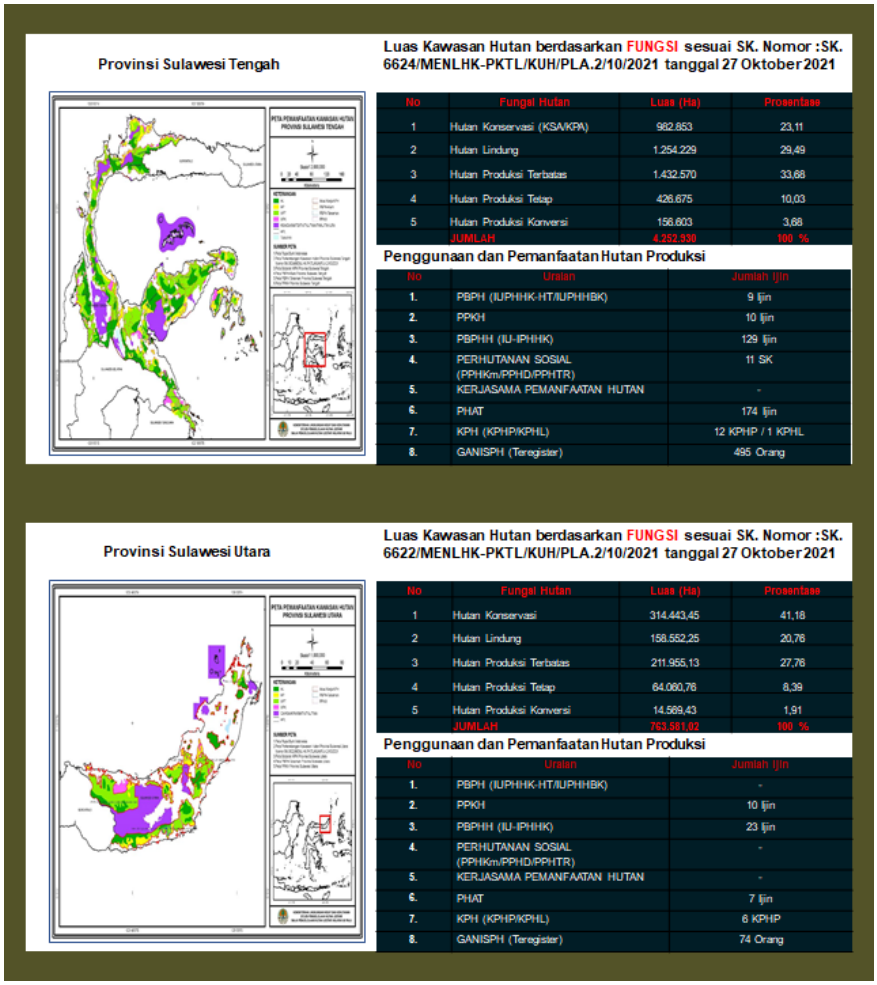

Provinsi Sulawesi Tengah

Luas Kawasan Hutan berdasarkan FUNGSI sesuai SK. Nomor :SK. 6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)	Prosentase
1	Hutan Konservasi (KSA/KPA)	982.853	23,11
2	Hutan Lindung	1.254.229	29,49
3	Hutan Produksi Terbatas	1.432.570	33,68
4	Hutan Produksi Tetap	426.675	10,03
5	Hutan Produksi Konversi	156.603	3,68
	JUMLAH	4.252.930	100 %

Penggunaan dan Pemanfaatan Hutan Produksi

No	Uraian	Jumlah Ijin
1.	PBPH (IUPHHK-HT/IUPHHBK)	9 Ijin
2.	PPKH	10 Ijin
3.	PBPHH (IU-IPHHK)	129 Ijin
4.	PERHUTANAN SOSIAL (PPHKm/PPHD/PPHTR)	11 SK
5.	KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN	-
6.	PHAT	174 Ijin
7.	KPH (KPHP/KPHL)	12 KPHP / 1 KPHL
8.	GANISPH (Teregister)	495 Orang

Provinsi Sulawesi Utara

Luas Kawasan Hutan berdasarkan FUNGSI sesuai SK. Nomor :SK. 6622/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)	Prosentase
1	Hutan Konservasi	314.443,45	41,18
2	Hutan Lindung	158.552,25	20,76
3	Hutan Produksi Terbatas	211.955,13	27,76
4	Hutan Produksi Tetap	64.060,78	8,39
5	Hutan Produksi Konversi	14.569,43	1,91
	JUMLAH	763.581,02	100 %

Penggunaan dan Pemanfaatan Hutan Produksi

No	Uraian	Jumlah Ijin
1.	PBPH (IUPHHK-HT/IUPHHBK)	-
2.	PPKH	10 Ijin
3.	PBPHH (IU-IPHHK)	23 Ijin
4.	PERHUTANAN SOSIAL (PPHKm/PPHD/PPHTR)	-
5.	KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN	-
6.	PHAT	7 Ijin
7.	KPH (KPHP/KPHL)	6 KPHP
8.	GANISPH (Teregister)	74 Orang

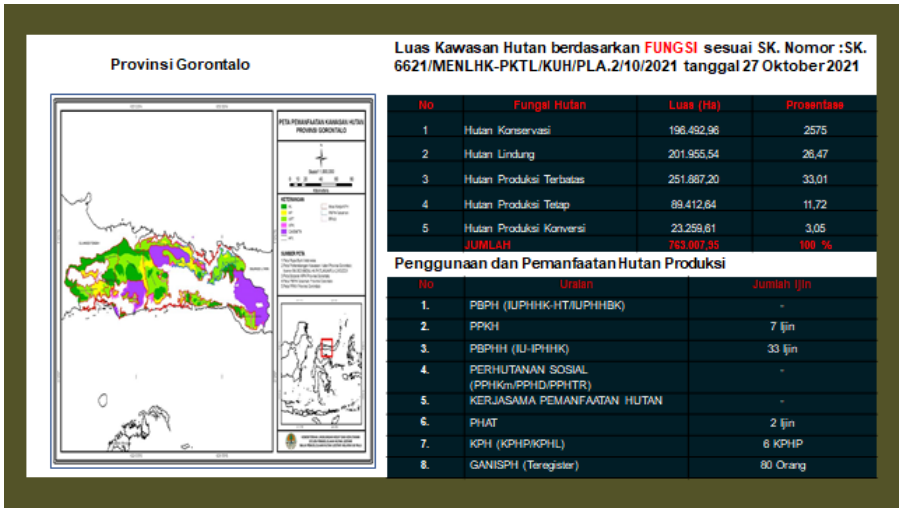

Provinsi Gorontalo

Luas Kawasan Hutan berdasarkan FUNGSI sesuai SK. Nomor :SK. 6621/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)	Prosentase
1	Hutan Konservasi	196.492,96	25,75
2	Hutan Lindung	201.955,54	26,47
3	Hutan Produksi Terbatas	251.887,20	33,01
4	Hutan Produksi Tetap	89.412,64	11,72
5	Hutan Produksi Konversi	23.259,61	3,05
	JUMLAH	763.007,95	100 %

Penggunaan dan Pemanfaatan Hutan Produksi

No	Uraian	Jumlah Ijin
1.	PBPH (IUPHHK-HT/IUPHHBK)	-
2.	PPKH	7 Ijin
3.	PBPHH (IU-IPHHK)	33 Ijin
4.	PERHUTANAN SOSIAL (PPHKm/PPHD/PPHTR)	-
5.	KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN	-
6.	PHAT	2 Ijin
7.	KPH (KPHP/KPHL)	6 KPHP
8.	GANISPH (Teregister)	80 Orang

Luas kawasan hutan produksi yang mencapai 2,6 juta Ha dan kawasan hutan lindung yang mencapai 1,6 juta Ha, merupakan potensi besar yang berperan strategis dalam pembangunan regional dan nasional untuk menyediakan barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian baik lokal maupun nasional, serta berperan dalam pelestarian lingkungan hidup dengan menjaga keseimbangan sistem tata air, tanah dan udara sebagai unsur utama daya dukung lingkungan dalam sistem penyangga kehidupan.

Kondisi perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19 yang memerlukan stimulus, turut mempengaruhi kebijakan pemerintah baik dalam konsep pengelolaan kehutanan juga dalam struktur penganggaran. Kebijakan untuk mendorong peningkatan produktivitas industri kehutanan dilakukan di sektor hulu dan hilir. Di sektor hulu antara lain dilakukan percepatan pengembangan agroforestry di areal PBPH, pembangunan multiusaha di areal PBPH serta penyederhanaan perizinan berusaha di bidang pemanfaatan hutan produksi. Di sektor hilir beberapa kebijakan yang dicanangkan pemerintah antara lain usulan peningkatan luas penampang produk ekspor industri Kehutanan, memperluas keberterimaan pasar dengan memperkokoh penerapan SVLK, serta fasilitasi sertifikasi SVLK untuk Usaha Kecil Menengah.

Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi, tahun 2022 pemerintah mengatur pengalokasian 5% anggaran belanja K/L sebagai dana cadangan penanggulangan COVID-19 melalui mekanisme *automatic adjustment*.. BPHL Wilayah XII di tahun anggaran 2022 melakukan 2 tahap pencadangan anggaran (*automatic adjustment*). Tahap pertama blokir AA sebelum tahun anggaran berjalan yakni di bulan Desember 2021 sejumlah Rp 205.714.000 kemudian blokir AA tahap kedua pada tanggal 3 Juni 2022 sebesar Rp 772.875.000.

Infografis 2. Petikan DIPA halaman IV.A (blokir AA tahap I)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 029.03.2.613221/2022
IV A. B L O K I R

DS:0481-7177-9598-0345

Kementerian Negara/Lembaga : [029] KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Unit Organisasi : [03] Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari
Provinsi : [18] SULAWESI TENGAH
Kode dan Nama Satker : [613221] BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XII PALU

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN
613221	**BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XII PALU**				
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	205.714		
	51 BELANJA PEGAWAI	Rp.	205.714		
029.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**				
5396	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari**				
5396.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**				
	512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)(RM)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	205.714		
	Automatic Adjusment				
	Disposisi: Automatic Adjustment				

Infografis 3. Petikan DIPA Halaman IV.A (blokir AA Tahap II)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 029.03.2.613221/2022
IV A. B L O K I R

DS:3273-4470-2765-3005

Kementerian Negara/Lembaga : [029] KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Unit Organisasi : [03] Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari
Provinsi : [18] SULAWESI TENGAH
Kode dan Nama Satker : [613221] BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII PALU

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN		
613221	**BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII PALU**				524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	772.875		Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	85.930
	52 Belanja Barang	Rp.	772.875		AA tahap ke-2 lingkup DItjen PHL		
029.03.FF	**Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**				Disposisi: Automatic Adjustment		
6729	**Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan**			**6732**	**Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan**		
6729.BIC	**Pengawasan dan Pengendalian Lembaga**			**6732.BIH**	**Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha**		
	521211 Belanja Bahan(RM)				524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	3.500		Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	182.068
	AA tahap ke-2 lingkup DItjen PHL				AA tahap ke-2 lingkup DItjen PHL		
	Disposisi: Automatic Adjustment				Disposisi: Automatic Adjustment		
6729.QDB	**Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga**			**6733**	**Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan**		
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)			**6733.BDH**	**Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha**		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	57.400		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	AA tahap ke-2 lingkup DItjen PHL				Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	90.249
	Disposisi: Automatic Adjustment				AA tahap ke-2 lingkup DItjen PHL		
6730	**Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan**				Disposisi: Automatic Adjustment		
6730.BIH	**Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha**			**6733.QDG**	**Fasilitasi dan Pembinaan UMKM**		
	521211 Belanja Bahan(RM)				524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	7.848		Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	301.578
	AA tahap ke-2 lingkup DItjen PHL				AA tahap ke-2 lingkup DItjen PHL		
	Disposisi: Automatic Adjustment				Disposisi: Automatic Adjustment		
6731	**Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan**			**6733.QIH**	**Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha**		
6731.BDH	**Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha**				521211 Belanja Bahan(RM)		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)				Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	4.132
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	40.170		AA tahap ke-2 lingkup DItjen PHL		
	AA tahap ke-2 lingkup DItjen PHL				Disposisi: Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment						
6731.QIH	**Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha**						

Pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) berakibat pada penyesuaian kembali rencana kegiatan yang pagunya terkoreksi. Penyesuaian tersebut berupa pengurangan volume target sub komponen kegiatan atau menghilangkan sama sekali sub komponen yang tidak terdanai.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XII berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2022 ditetapkan menjadi Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XII dengan lokasi kedudukan dan wilayah kerja tetap atau tidak mengalami perubahan.

Dalam melaksanakan penugasan, BPHL menjalankan fungsi teknis yang didukung dengan kegiatan dukungan manajemen operasional perkantoran. Pelaksanaan fungsi teknis juga digambarkan dalam infografis berikut ini :

Infografis4.Fungsi Organisasi BPHL sesuai Permen LHK No.16 tahun 2022

C. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai, Kepala Balai didukung oleh Sub Bagian Tata Usaha, Seksi P3HPHL (Perencanaan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung), Seksi PEPHL (Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung) dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan satuan organisasi maupun instansi lain di luar Balai sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari

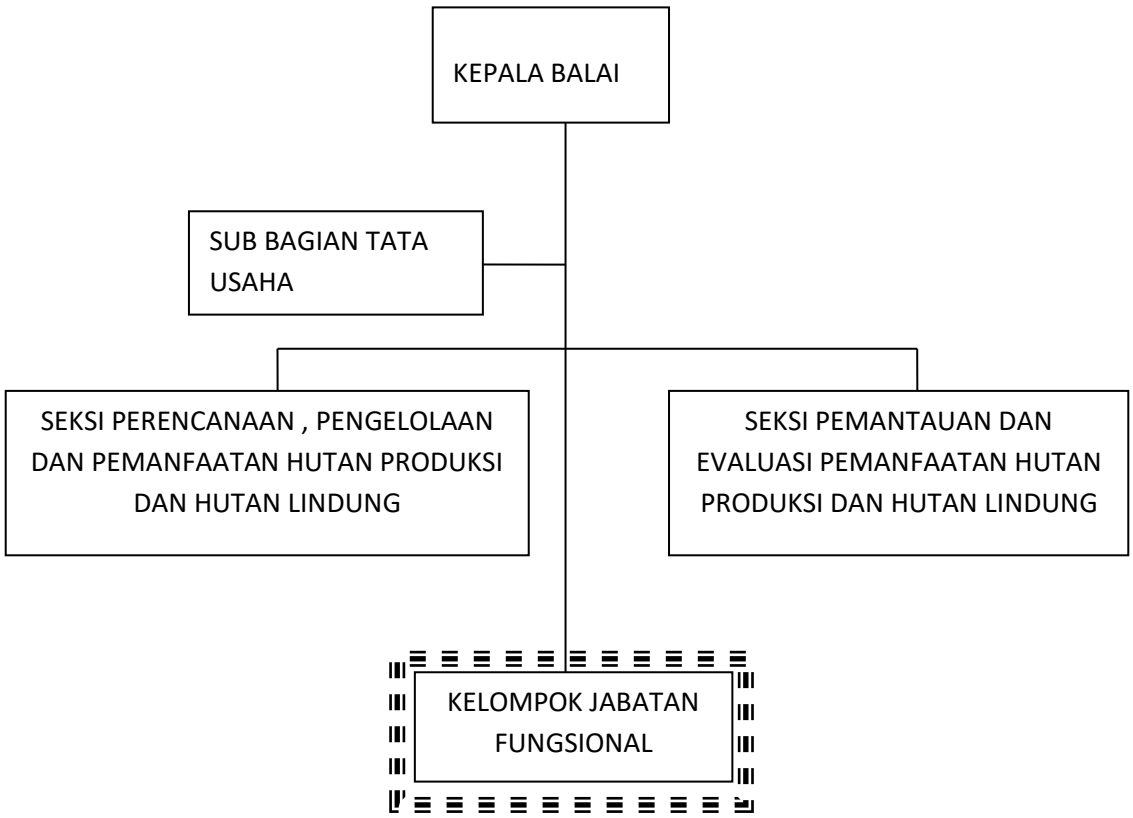

Sumber daya manusia pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII posisi bulan Desember tahun 2022 berjumlah 29 Orang Pegawai Negeri Sipil dan 9 orang tenaga PPNPN, seperti ditampilkan dalam infografis berikut ini :

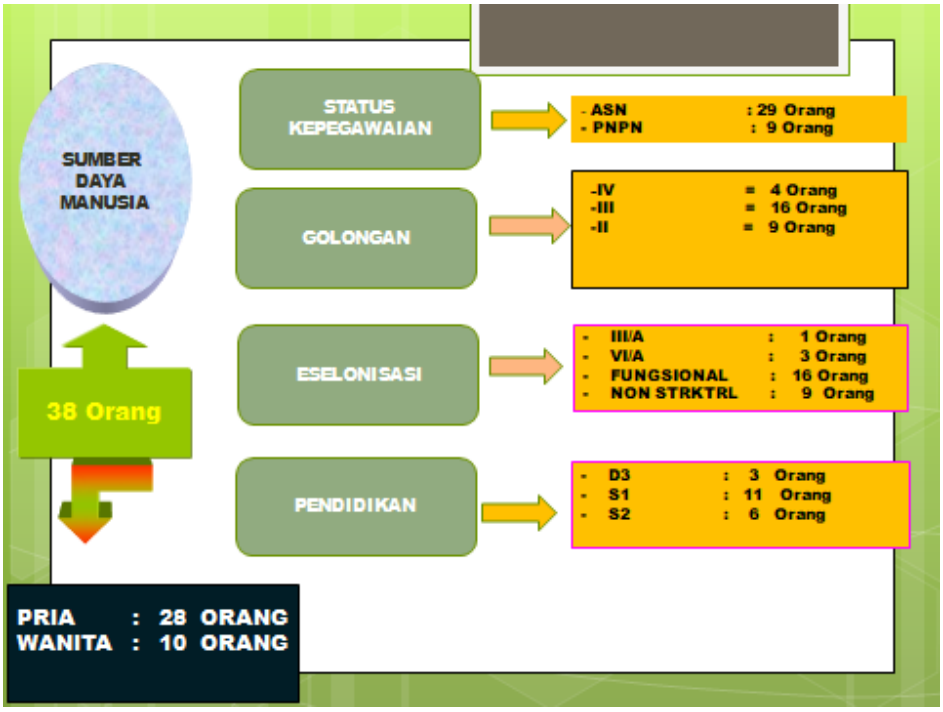

Infografis 5. Distribusi Pegawai BPHL Wilayah XII Menurut Jenis Kelamin, Golongan, Eselonisasi dan Tingkat Pendidikan

D. Maksud, Tujuan dan Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini menginformasikan pencapaian kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII (untuk selanjutnya disebut Balai) terhadap target Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja yang juga dapat menjadi *feedback* bagi perbaikan perencanaan dan pencapaian kinerja di masa mendatang. Sesuai Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014, *outline* Laporan Kinerja terdiri atas :

Bab I - Pendahuluan, menjelaskan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek startegis organisasi serta permasalahan utama (*strategic* issues) yang sedang dihadapi pada tahun 2022;

Bab II - Perencanaan Kinerja, menyajikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022 termasuk rencana aksi Perjanjian Kinerja;

Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja Balai sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan, analisis capaian kinerja yang dikaitkan dengan *gap* kinerja dan berbagai langkah untuk meningkatkan kinerja ke depan serta realisasi anggaran;

Bab 4 - Penutup, berupa simpulan dari Laporan Kinerja Tahun 2022 dan saran yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa datang.

Lampiran

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 perencanaan dan penganggaran didasarkan pada kaidah *money follow program*. Pengamatan dan evaluasi dari penerapan konsep *money follow program* menunjukkan beberapa kendala yang perlu diatasi dengan cara sinkronisasi dan konsolidasi program. Dari konsep perencanaan dan penganggaran di atas, lahirlah Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Pedoman RSPP yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan mengkarakteristikan tugas dan fungsi unit kerja bersifat sangat spesifik (unik) yang menggambarkan pencapaian sasaran kegiatan secara langsung unit kerja yang disebut Rincian Output.

Gambar 2.
Pengemasan produk HHBK gula semut ArenGo oleh KTH Huyula di bawah naungan KPHP Unit VI yang dipimpin seorang Kepala KPH wanita.. ArenGo sudah memasuki pasar internasional (Belanda, Inggris)

Rencana kerja BPHL Wilayah XII tahun 2022 mengusung konsep pengelolaan hutan tingkat tapak berbasis responsif gender. Keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan memperhatikan pengarusutamaan gender dan mendorong peran pengembangan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Dengan kebijakan RSPP, Balai diharapkan merumuskan RENJA yang menyentuh hingga ke level output yang berkualitas (*eye catching* dan spesifik). Balai tidak lagi memiliki IKK tetapi mendukung pencapaian target IKK unit kerja eselon II melalui pelaksanaan Rincian Output. Rincian Output BPHL Wilayah XII tahun 2022 adalah sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022.

B. PERJANJIAN KINERJA 2022

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Balai Pengelolaan Hutan Lestilayah ari Wilayah XII akan mendukung pencapaian IKP Dirjen PHL yang dijabarkan dan diselaraskan secara vertikal dalam bentuk Indikator Kinerja Kegiatan Eselon II yang diampu oleh beberapa Direktorat. Selanjutnya Indikator Kinerja Kegiatan Eselon II tersebut diturunkan ke 16 (enam belas) satuan kerja BPHL dalam bentuk Rincian Output (RO) yakni Output spesifik berupa produk akhir yang dihasilkan oleh Balai baik berupa barang infrastruktur/non infrastruktur maupun berupa jasa.

Rincian Output menjadi indikator kinerja Balai, yang disepakati Kepala Balai dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. BPHL Wilayah XII mengemban 14 Rincian Output sebagaimana ditampilkan berikut :

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BPHL Wilayah XII Tahun 2022

NO	RINCIAN OUTPUT	TARGET
(1)	(2)	(3)
Program Dukungan Manajemen		
1	Layanan Umum	1 Layanan
2	Layanan Perkantoran	1 Layanan
3	Layanan Sarana Internal	1 Unit
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		
4	HLN Forest Investment Program (FIP) II : Promoting Sustainable Commonity Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	1 Kegiatan
5	Perencanaan Pengelolaan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	1 Lembaga
6	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	1 Lembaga
7	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	3 Badan Usaha
8	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1 Badan Usaha
9	Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Badan Usaha
10	Fasilitasi dan Pembinaan Tertib Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan	5 Badan Usaha
11	Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan	6 Badan Usaha
12	Fasilitasi dan Pembinaan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah	10 Badan Usaha
13	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	4 UMKM
14	Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	7 Badan Usaha

Rincian output dapat dikatakan sebagai “produk turunan” akhir dari kinerja program Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari. Untuk memahami definisi dari target rincian output dalam Perjanjian Kinerja di atas, berikut disajikan alur pelimpahan vertikal atau *Cascading* IKP UKE eselon I, IKK UKE eselon II dan RO BPHL Tahun 2022 sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. MATRIKS Cascading IKP, IKK, RO LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PHL

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) UKE I	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) UKE II	RINCIAN OUTPUT/SATKER
T1.S4.1.1.1. Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan.	T1.S4.1.1.1.2.1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung; (Dit. BRPH)	6729.AFA.001 - NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan.
		6729.BAH.001 - Layanan Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan)
	T1.S4.1.1.1.2.2. KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan; (Dit. BRPH)	6729.BAB.001 - Layanan Pengesahan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hutan - RPHJP.
		6729.BEF.001 - HLN Forest Investment Program (FIP) I : Investasi Khusus Bagi Masyarakat untuk Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan
		6729.BIC.001 - Perencanaan Pengelolaan Hutan yang diawasi dan dikendalikan
	T1.S4.1.1.1.2.3. Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari. (Dit. BRPH)	6729.QDB.001 - Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Hutan
		6729.QDB.002 - Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari
	T1.S4.1.1.1.1.1. Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan; (Dit.PUPH)	6731.QAC.001 - Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan
T2.S2.1.1.1. Jumlah produksi kayu bulat.	T2.S2.1.1.1.2.1. Investasi perizinan berusaha pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Dit. BUPH)	6730.AFA.001 - NSPK usaha pemanfaatan hutan
		6730.BAH.001 - Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

	T2.S2.1.1.1.2.2. Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan. (Dit. BUPH)	6730.BDH.001 - Pembinaan Teknis/ Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan
		6730.BIH.001 - Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan
	T2.S2.1.1.1.1.1. Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas; (Dit. PUPH)	6731.AFA.001 - NSPK Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan
		6731.BDH.001 - Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan
	T2.S2.1.1.1.1.2. Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu; (Dit. PUPH)	6731.QIH.001 - Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan
	T2.S2.1.1.1.1.3. Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan. (Dit. PUPH)	6731.BDH.002 - Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
T3.S3.1.2.1. Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat.	T3.S3.1.2.1.1.1 Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat. (Dit. PUPH) *Belum tercantum pada dokumen anggaran	6731.BDD.001 - Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan HUtan
T2.S4.1.1.1. Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan.	T2.S4.1.1.1.1.1. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan; (Dit. IPHH)	6732.AFA.001 - NSPK Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan
		6732.BAC.001 - Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan
		6732.BIH.001 - Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan
	T2.S4.1.1.1.1.2. Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT. (Dit. IPHH)	6732.BDH.001 - Pembinaan Teknis/ Supervisi Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan

		6732.BDH.002 - Fasilitasi dan Pembinaan Tertib Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan
T2.S3.1.1.1. Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan.	T2.S3.1.1.1.1.1. Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK; (Dit. BPPHH)	6733.AFA.001 - NSPK Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
		6733.PBV.001 - Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu
		6733.QAH.001 - Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar
		6733.QDH.001 - Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
		6733.BDH.002 - Fasilitasi dan Pembinaan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah
		6733.QIH.001 - Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya
	T2.S3.1.1.1.2.1. Ekspor produk olahan hasil hutan; (Dit. BPPHH)	6733.BAC.001 - Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan
	T2.S3.1.1.1.2.2. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilikan SVLK. (Dit. BPPHH)	6733.QDG.001 - Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan
		6733.QDG.002 - Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHL

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA 2022

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk menghitung capaian kinerja Balai dilakukan beberapa analisis terhadap beberapa aspek berikut :

- Membandingkan target dan realisasi Rencana Kerja dan PK 2022
- Membandingkan realisasi capaian tahun 2022 terhadap target Renstra
- Membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan capaian tahun sebelumnya
- Analisis keberhasilan/kegagalan pelaksanaan rencana dan upaya perbaikan/peningkatan ke depan
- Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Pencapaian kinerja BPHL Wilayah XII tahun 2022 pertama-tama dinilai realisasi Rincian Output (RO) berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penjabaran volume pencapaian RO BPHL Wilayah XII tahun 2022 ditampilkan dalam tabel 1 berikut :

Tabel 3. Rincian Realisasi per RO BPHL Wilayah XII Palu Tahun 2022

3.1 Rincian Realisasi RO 6729.BIC.001

Bulan	Rincian Realisasi
Januari	Tahap perencanaan kegiatan
Februari	Tahap persiapan Juklak Juknis
Maret	pengawasan dan pengendalian implementasi RPHJP/RPHJPd
April	Pengawasan dan pengendalian Implementasi RPHJP/RPHJPd 2. pembuatan demplot agroforestry 3. koordinasi pelaksanaan pembuatan agroforestry ke BPHL
Mei-Juli	pengawasan dan pengendalian implementasi RPHJP/RPHJPd
Agust-Sept	koordinasi kegiatan pembuatan demplot agroforestry
Okt-Nop	1.Koordinasi/konsultasiKegiatan/Diklat/workshop/Seminar/Rakor/Raker/FGD 2. verifikasi KPH Efektif
Desember	1. Pengawasan Pengendalian Implementasi dan Verifikasi KPH Eefektif di Proponsi Gorontalo 3 KPH 1.KPH Wilayah IV Gorontalo Utara, 2.KPH Wilayah V Boalemo 3.KPH Wilayah VI Gorontalo

3.2. Rincian Realisasi RO 6729.BEF.002

Bulan	Rincian Realisasi
Januari	Kegiatan dalam tahap persiapan
Februari	1. kegiatan Rapat Komite Konsultan pada KPH Dampelas Tinombo 2.Kegiatan Workshop Perhitungan Karbon pada KPH Dampelas Tinombo.
Maret	1. Koordinasi Kegiatan KPH Dolago Tanggunung ke BPHL 2.Kegiatan Komite pada KPH Dampelas Tinombo Tanggal 31 Januari 2022
April	1. Pengadaan peralatan dan Mesin untuk diserahkan ke Masyarakat PEMDA 2. Kegiatan Koordinasi Ke Kantor BPHL XII Palu
Mei	Promoting Sustainable Comonity KPH Dolago
Juni	1. Pembuatan SOP 2. Pengadaan Neon Box 3. Kegiatan Koordinasi Ke Pusat
Juli	1. Pengadaan peralatan dan Mesin Standing AC 2 PK 2. Paket Fullboard Meeting Kegiatan Bimtek Pengoperasian dan Ujikom Drone 3. Kegiatan Pengembangan Pengolahan HHBK
Agustus	1. Workshop Pengembangan Analisa Potensi Pasar&Promosi Hasil Produk Hutan 2. Paket Fullboard Bimtek Meeting Keg. Workshop Perhitungan Karbon 3. Kegiatan Pendampingan Penyusunan AD/ART KPH Dampelas Tinombo
September	1. Penyusunan Dokumen Review RPHJP 2. Pengadaan Tempat Pajangan Produk KTH.
Oktober	1. Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Exit Strategi dan Laporan Akhir FIP II 2. Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Kegiatan FIP II HLN 3. Konsultan Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir dan Exit Strategi 4. Pengadaan Meja Custom
November	1. Kegiatan FGD Laporan akhir dan exit strategi 2. Kegiatan pertemuan komite konsultatif daerah 3. Pengadaan Neon Box di Desa Siweli 4. kegiatan rapat komite konsultatif 5. pengadaan berupa Neon box di KTH Mart Desa
Desember	Koordinasi dan Konsultasi Ke Pusat

3.3. Rincian Realisasi RO 6729.QDB.002

Bulan	Rincian Realisasi
Januari	Tahap persiapan
Februari	Pembayaran honor PPNPN bulan Januari tahun 2022 untuk 3 pegawai
Maret	Pembayaran honor PPNPN bulan Februari 2022 untuk 3 orang pegawai
April	1. pembuatan demplot agroforestry 2. pembayaran THR keagamaan PPNPN Tahun 2022 untuk 3 pegawai
Mei	1. pengadaan dan pemeliharaan bibit tanaman demplot agroforestry 2. Pembayaran honor PPNPN bulan Mei 2022 untuk 3 pegawai
Juni	1. Pemeliharaan tahun I demplot agroforestry 2. PembentukanKTH/Bimbingan /Teknis
Juli-Nov	1. Pembayaran Honor PPNPN bulan Juli- November untuk 3 pegawai 2.Pembayaran honor EA bulan juni-Oktober 2022
Desember	1. Pembuatan Demplot Argovoresty di KPH Sivia Patuju-Tojo Una Una 2. Pemeliharaan Demplot Argoforesty Tahun I di KPH Banawa Lalundu 3. Pemeliharaan Demplot Argoforesty Tahun I di KPH Unit II Boltim dan Bolsel

3.4. Rincian Realisasi 6731.BDH.002

Bulan	Rincian Realisasi
Jan -Maret	tahap perencanaan
April-Juni	Tahap persiapan
Juli	1. ABK UPT Ditjen PHL dan Perubahan Draf PermenLHK Tentang Juknis PE 2. Workshop Peningkatan Pengetahuan SIPUHH Bagi Operator BPHL 3. Rakornis Teknis Pengelolaan Hutan Lestari
Agust-Sept	Wasdal Produksi Hasil Hutan dan HGU di Kab. TOilitoli dan Pohuwato
Oktober	Pengawasan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan Kayu pada PHAT
November	Wasdal Penanaman / Produksi Hasil Hutan / Multi Usaha Kehutanan
Desember	Fasiltasi Penggembangan Multi Usaha Kehutanan Sulawesi Tengah : 1.PT.Riu Mamba Karya Sentosa 2. PT Berkat Hutan Pusaka 3.PT.Wana Rindang Lestari.

3.5. Rincian Realisasi 6730.BIH.001

Bulan	Rincian Realisasi
Jan-April	Tahap perencanaan
Mei	Tahap persiapan
Juni	Monitoring dan Supervisi evaluasi monitoring HHBK
Juli	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Usaha HHBK dan Jasling pada HHBK
Agust-Okt	Wasdal Produksi Hasil Hutan pada PHAT Morowali Utara
Nov-Des	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Usaha HHBK/HHK dan Jasling

3.6. Rincian Realisasi 6731.QIH.001

Bulan	Rincian Realisasi
Jan-Juni	Tahap perencanaan
Juli	Rakornis Pengelolaan Hutan Lestari di Surabaya, Rakonis SOP BSM di Tangerang Banten dan Undangan FOLU di Makassar
Agustus	Wasdal penanaman/produksi hasil hutan/Multiusaha Kehutanan
Sept-Okt	Wasdal produksi HHK pada PHAT
November	1. Wasdal penanaman / produksi hasil hutan /multiusaha kehutanan, 2. Belanja ATK / Spanduk dan Pemateri
Desember	1. Bedah Kinerja Pada 9 PBPH Lingkup BPHL Wilayah XII Palu di 3 Propinsi Wilayah Kerja di Propinsi Sulawesi Tengah.

3.7. Rincian Realisasi 6732.BDH.002

Bulan	Rincian Realisasi
Jan-Juli	Tahap perencanaan
Agustus	1. Pembekalan Teknis SIPUHH/SIPNBP/SIGANISHUT Bagi Operator 2. Monev Tertib Pelaksanaan Iuran Kehutanan &Peredaran Hasil Hutan
Sept-Okt	Bimtek Tertib Pelaksanaan Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan pada KPH Kab. Parigi dan Donggala
Nov-Desember	Bimtek SI-PUHH / SIPNPNB/SIGANISHUT Pada 11 Wajib Bayar PBPH/HGU/PPKH sebanyak 11. di 1.Propinsi Sulawesi Tengah 2. Propinsi Gorontalo

3.8. Rincian Realisasi 6732.BIH.001

Bulan	Rincian Realisasi
Jan-Maret	Tahap perencanaan
Apr-Okt	1. Monitoring dan Evaluasi Tertib Pelaksanaan Iuran Kehutanan dan Perdaran Hasil Hutan pada PKKNK PT. Gorontalo Minerals
November	Monev&supervisi Pelaksanaan Tertib Iuran dan Peredaran Hasil Hutan
Desember	Monev Pelaksanaan Tertib Iuran dan Peredaran Hasil Hutan pada 8 PPKH di Provinsi Sulawesi Tengah.

3.9. Rincian Realisasi 6733.BDH.002

Bulan	Rincian Realisasi
Jan-Maret	Tahap perencanaan
April-Juni	1. Koordinasi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala UMKM
Juli	Pembinaan Teknis PBPHH
Agustus	1. fasilitasi, pembinaan teknis dan monev fasilitasi PBPHH 2. koordinasi PBPHH skala uUMKM
Sept-Nov	Monev fasilitasi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Huta
Desember	1. Bimbingan Teknis PBPHH Skala Usaha Keci dsn Menengah di 14 PBPHH di Provinsi Sulawesi Tengah 2. Monitoring dan Evaluasi Bimbingan Teknis PBPHH

3.10. Rincian Realisasi 6733.QDG.001

Bulan	Rincian Realisasi
Jan-Maret	Tahap perencanaan dan persiapan
April	Inventarisasi dan verifikasi UMKM
Juni	Fasilitasi pemasaran produk UMKM Ber SVLK
Juli-Sept	1. koordinasi/pembentukan kelompok UMKM 2. Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu pada Kelompok UMKM oleh BPHL 3. Supervisi kegiatan Sertifikasi/Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bagi UMKM
Oktober	evaluasi implementasi SVLK
Nov-Des	1. evaluasi implementasi SVLK 2. Sosialisasi peraturan SVLK 3. koordinasi/konsultasi/workshop/FGD/rakor/raker

3.11. Rincian Realisasi 6733.QIH.001

Bulan	Rincian Realisasi
Jan-Feb	Tahap perencanaan
Maret	Pemantauan Harga Pasar Produk Hasil Hutan, Kinerja Usaha dan Perzinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Bersertifikat PBPHH
April	Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBPHH dan HHBK
Mei	pengawasan HHBK
Juni	Pemantauan harga pasar hasil produk hutan, kinerja usaha dan perizinan berusaha pengelolaan hasil hutan bersertifikat PBPH
Juli	Pemantauan Harga Pasar Produk Hasil Hutan / Kinerja Usaha / Perizinan BPHH bersertifikat
Agust-Okt	Koordinasi / Konsultasi Teknis ke Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi di Makassar
November	pemantauan harga pasar produk hasil hutan/ kinerja usaha/ perizinan berusaha pengolahan hasil hutan bersertifikat
Desember	Pemantauan Harga pasar Produk hasil hutan/kinerja usaha/ perijinan berusaha pengolahan hasil hutan bersertifikat pada PBPHH,hasil pemantauan menunjukkan ada 7 PBPHH berstifikat VLK di 7 PBHH di Propinsi Sulawesi Tengah.

3.12. Rincian Realisasi 5396.EBA.962

Bulan	Rincian Realisasi
Januari-Desember	Layanan dukungan manajemen Satker berupa : Pembayaran honor SPIP dan keikutsertaan dalam kegiatan rekon/workshop/raker/rakornis keuangan, perbendaharaan, program anggaran, dan kepegawaian

3.13. Rincian Realisasi 5396.EBA.994

Bulan	Rincian Realisasi
Januari-Desember	Layanan dukungan manajemen 1. Pembayaran gaji januari-Desember, gaji ke13 dan THR PNS terbayarkan tepat waktu; 2. Pembayaran tukin dan uang makan Januari-Desember terbayarkan tepat waktu; 3. uang makan dan uang lembur terbayarkan sesuai peraturan yang berlaku

3.14. Rincian Realisasi 5396.EBB.951

Bulan	Rincian Realisasi
Maret	Pengadaan meja kerja staf
April	Belanja Modal berupa Pembelian Printer

Rincian realisasi dianalisis menurut karakteristik indikator RO yang ditetapkan dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), sehingga ditemukan volume capaian yang memenuhi kriteria target RO pada KAK yang kemudian menjadi dasar penginputan data realisasi pada SmartDJA.

Tabel 4. Pencapaian Kinerja RO Tahun 2022 sesuai laporan SmartDJA

	Rincian Output	Target	Realisasi
Program Dukungan Manajemen			
	Layanan umum	1 Layanan	1 Layanan
	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
	Layanan Sarana Internal	1 Unit	1 Unit
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			
	HLN Program FIP II : Promoting Sustainable Commonity Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	Perencanaan Pengelolaan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	1 Lembaga	3 Lembaga
	Fasilitasi dan Pembinaan KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari	1 Lembaga	3 Lembaga
	Kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang diawasi dan dikendalikan	3 badan usaha	3 badan usaha
	Fasilitasi pengembangan multiusaha bagi perizinan berusaha pemanfaatan hutan	1 Badan Usaha	2 Badan Usaha
	Kinerja multi usaha pemanfaatan hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 badan usaha	9 badan usaha
	Fasilitasi dan pembinaan tertib iuran dan penatausahaan hasil hutan	5 Badan Usaha	11 Badan Usaha
	Iuran dan penatausahaan hasil hutan yang diawasi dan dikendalikan	6 badan usaha	8 badan usaha
	Fasilitasi dan pembinaan perizianan berusaha pengolahan hasil hutan skala usaha kecil menengah	10 badan usaha	14 badan usaha
	Fasilitasi dan pembinaan UMKM Kehutanan	4 UMKM	4 UMKM
	Perizinan pengolahan hasil hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	7 Badan usaha	7 Badan usaha

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga pada Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi perencanaan. Pada infografis berikut, ditampilkan nilai efisiensi BPHL Wilayah XII tahun 2022 yang diformulasikan menurut aplikasi SmartDJA Kemenkeu.

Infografis 6. Nilai SMART menurut data SmartDJA tanggal 12 Januari 2022

Capaian kinerja semestinya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa mendatang, demikian pula capaian kinerja di masa sebelumnya dapat menjadi salah satu indikator ada atau tidaknya perbaikan atau peningkatan kinerja Balai. Dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021, diharapkan ada bahan evaluasi untuk menjadi pendukung pengambilan kebijakan pimpinan untuk perbaikan kinerja Balai.

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Capaian target RO Tahun 2021 dan 2022

Rincian Output	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
Layanan umum	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
Layanan Sarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
HLN Program FIP II : Promoting Sustainable Commonity Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
Perencanaan Pengelolaan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	7 Lembaga	9 Lembaga	1 Lembaga	3 Lembaga
Fasilitasi dan Pembinaan KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari	RO tidak ada di tahun 2021		1 Lembaga	3 Lembaga
Kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang diawasi dan dikendalikan	1 Lembaga	8 Lembaga	3 badan usaha	3 badan usaha
Fasilitasi pengembangan multiusaha bagi perizinan berusaha pemanfaatan hutan	RO tidak ada di tahun 2021		1 Badan Usaha	2 Badan Usaha
Kinerja multi usaha pemanfaatan hutan yang diawasi dan dikendalikan	RO tidak ada di tahun 2021		2 badan usaha	9 badan usaha
Fasilitasi dan pembinaan tertib iuran dan penatausahaan hasil hutan	1 Lembaga	1 Lembaga	5 Badan Usaha	11 Badan Usaha
Iuran dan penatausahaan hasil hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Lembaga	16 Lembaga	6 badan usaha	8 badan usaha
Fasilitasi dan pembinaan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan skala usaha kecil menengah	RO tidak ada di tahun 2021		10 badan usaha	14 badan usaha
Fasilitasi dan pembinaan UMKM Kehutanan	RO tidak ada di tahun 2021		4 UMKM	4 UMKM
Perizinan pengolahan hasil hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	10 Lembaga	36 Lembaga	7 Badan usaha	7 Badan usaha

B. REALISASI ANGGARAN

DIPA tahun 2022 Satker BPHL Wilayah XII, mengalami 3 kali revisi besaran pagu. 1 kali Revisi penambahan pagu karena adanya Top Up dana HLN program FIP II dan 2 kali revisi pengurangan pagu untuk menghapus/realokasi pagu anggaran yang terblokir.

Tabel 6. Monitoring Revisi Realokasi Anggaran BPHL Wilayah XII Tahun 2022

REVISI	TANGGAL	DIGITALSTAMP	PAGU	KETERANGAN REVISI
10	1 Desember 2022	4829-2068-6303-6130.	10,435,066,000	Revisi Realokasi Anggaran Lingkup Ditjen PHL TA 2022 Yang Terblokir Ke BUN
8	11 Oktober 2022	3273-4470-2765-3005	11,207,941,000	Revisi DJA (hapus blokir belanja pegawai)
4	24 Mei 2022	0025-4915-1448-6404	11,413,655,000	Revisi DJA Top Up Dana HLN Program FIP II
0	17-Nov-21	0931-1482-8052-3154	10,972,155,000	DIPA Awal

Anggaran DIPA tahun 2022 BPHL Wilayah XII dialokasikan untuk kegiatan utama yaitu program pengelolaan hutan berkelanjutan yang pagunya berdasarkan revisi terakhir berjumlah Rp5.790.280.000 dan kegiatan pendukung yakni program dukungan manajemen yang pagunya berdasarkan revisi terakhir berjumlah Rp4.644.786.000.. Berdasarkan jenis belanja, anggaran BPHL Wilayah XII dibagi menjadi 3 kategori : Belanja pegawai dengan pagu revisi terakhir Rp3.362.286.000, belanja barang dengan pagu revisi tearakhir Rp7.002.780.000 dan belanja modal dengan pagu revisi terakhir Rp70.000.000.

Realisasi anggaran tahun 2022 diambil dari data OMSpan tanggal 12 Januari 2023, menunjukkan angka capaian 99,69% atau senilai Rp 10.402.817.090 dari total Pagu akhir yang berjumlah Rp 10.435.066.000. Sisa dana tidak terealisasi porsi terbesar ada pada pagu belanja pegawai, yang tersisa senilai Rp 31.545.426 atau sebesar 0,94% dari pagu belanja pegawai.

Tabel 7. Realisasi Anggaran BPHL Wilayah XII Per Jenis Belanja Tahun 2022 (data OMSpan 12 Januari 2023)

OM-SPAN

BALAI PEMANTAUA...
T.A. 2022

Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja

EXCEL PDF FILTER

12-01-2023 10:49:43 WIB TIDAK ADA FILTER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE | NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER	
1	613221 | BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII PALU	PAGU	3,362,286,000	7,002,780,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	10,435,066,000
		REALISASI	3,330,740,574	7,002,133,276	69,943,240	0	0	0	0	0	0	10,402,817,090
			(99.06%)	(99.99%)	(99.92%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(99.69%)
		SISA	31,545,426	646,724	56,760	0	0	0	0	0	0	32,248,910
GRAND TOTAL		PAGU	3,362,286,000	7,002,780,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	10,435,066,000
		REALISASI	3,330,740,574	7,002,133,276	69,943,240	0	0	0	0	0	0	10,402,817,090
			(99.06%)	(99.99%)	(99.92%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(99.69%)
		SISA	31,545,426	646,724	56,760	0	0	0	0	0	0	32,248,910

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Per Jenis Belanja Tahun 2021 dan Tahun 2022

KETERANGAN	JENIS BELANJA							
	PEGAWAI		BARANG		MODAL		TOTAL	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
PAGU (dalam ribuan rupiah)	3,255,300	3,362,286	10,718,285	7,002,780	182,153	70,000	14,155,738	10,435,006
REALISASI (dalam ribuan rupiah)	3,179,092	3,330,740	10,686,007	7,002,13	181,338	69,943	14,046,438	10,402,817
PERSEN REALISASI	97,66%	99,06%	99,70%	99,99%	99,55%	99,92%	99,23%	99,69%
SISA (dalam ribuan rupiah)	76,207	31,545	32,277	646	814		109,299	32,248

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun lalu, ada peningkatan realisasi di tahun 2022 sebesar 0,49%. Perbandingan lebih rinci berdasarkan realisasi per jenis belanja disajikan pada tabel di atas. Dengan demikian dapat dikatakan realisasi penyerapan anggaran BPHL Wilayah XII dari tahun 2021 hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan.

Peningkatan nilai realisasi tersebut di atas, bukan tanpa hambatan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran tahun 2022 adalah :

1) Upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 berpengaruh cukup signifikan terhadap postur anggaran BPHL Wilayah XII, dimana terjadi 2 kali blokir pencadangan anggaran (*automatic adjustmen)* sepanjang tahun 2022. Blokir anggaran tersebut kemudian direalokasikan kas Bendahara Umum Negara (BUN);
2) Terdapat kelebihan anggaran pada output Layanan Perkantoran berupa belanja pegawai sebesar Rp.31,545,426- sehingga mempengaruhi persentase penyerapan anggaran pada output tersebut. Kelebihan belanja pegawai diakibatkan adanya pegawai yang bermutasi tugas dan alokasi belanja pegawai untuk Kepala Seksi PEPHP yang tidak terserap karena pelantikan pejabat eselon IV tertunda;
3) Kekurangan anggaran pada belanja operasional perkantoran misalnya pada kebutuhan listrik kantor serta pemeliharaan gedung kantor, kendaran dan peralatan mesin, mengakibatkan pengeluaran untuk listrik ditangguhkan ke tahun anggaran 2023, demikian pula dengan kebutuhan perbaikan beberapa bagian gedung kantor yang terdampak bencana gempa bumi tahun 2018 serta pemeliharaan kendaraan ataupun peralatan mesin tidak dapat dilaksanakan di tahun 2022.

C. PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan target kinerja yang diamanatkan para pemangku kepentingan. Dalam pencapaian kinerja, BPHL Wilayah XII tahun 2022 menorehkan beberapa prestasi, yaitu :

1. Mendapat penghargaan dari Direktorat Jenderal PHL Kementerian LHK, sebagai peraih peringkat I untuk Satker Lingkup Direktorat Jenderal PHL yang telah menyusun Desain SPIP Online Tahun 2022 dengan baik dan memperoleh kategori memadai (nilai 95);
2. Berhasil memfasilitasi 3 KPHP di wilayah kerja BPHL Wilayah XII meraih sertifikat dari Direktorat Bina Rencana Pemanfataan Hutan Ditjen PHL Kementerian LHK sebagai KPH EFEKTIF yakni KPHP unit VI Gorontalo Provinsi Gorontalo dengan nilai 92,13, KPHP unit IV Gorontalo Utara Provinsi dengan nilai 84,25, dan KPHP Unit V Boalemo Provinsi Gorontalo dengan nilai 82,23

Piagam penghargaan tersebut di atas menjadi lampiran dari Laporan Kinerja BPHL Wilayah XII Tahun 2022 ini.

Pencapaian kinerja BPHL Wilayah XII menghadapi tantangan baik internal maupun faktor eksternal yang harus diatasi dengan kebijakan yang tepat. Faktor-faktor tantangan pencapaian kinerja antara lain :

1. Adanya blokir pencadangan anggaran (*Automatic Adjusment)* mengurangi pagu anggaran beberapa kegiatan, antara lain untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian badan usaha serta kegiatan fasilitasi SVLK PBPHH berskala UMKM, mengakibatkan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan optimal;
2. Sumber daya manusia utamanya pegawai di seksi teknis tidak mencukupi kebutuhan BPHL Wilayah XII yang memiliki cakupan wilayah kerja sangat luas menjangkau 3 provinsi, akibatnya pelaksanaan tugas kadang-kadang harus ditunda demi ketersediaan personil;
3. Kekurangan sumber daya manusia juga berpengaruh terhadap lambatnya penyediaan data dan laporan yang diperlukan pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan;
4. Tantangan dari eksternal misalnya belum semua KPH memiliki dokumen RPHJP dan RPHJPd yang diperlukan sebagai data dukung rencana fasilitasi dan pengawasan, karena karena belum adanya kesesuaian pemetaan wilayah dengan peta arahan indikatif pemanfaatan hutan Kementerian LHK.

Peningkatan akuntabilitas kinerja BPHL Wilayah XII dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

1. Penyusunan skala prioritas dalam menentukan objek pengawasan dan pengendalian kinerja badan usaha secara representatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran wasdal.
2. Mengusulkan rencana fasilitasi SLK untuk perizinan berusaha hasil hutan skala UMKM di tahun anggaran 2023;
3. Mendorong dan mengkoordinasikan tersedianya data lengkap Analisi Beban Kerja (ABK) Balai untuk memetakan ketersediaan pegawai sehingga memenuhi kebutuhan;
4. Peningkatan ketertiban administrasi pertanggungjawaban kegiatan ;
5. Koordinasi yang baik dalam lingkungan kantor BPHL Wilayah XII maupun dengan pihak lain yang berperan dalam pelaksanaan anggaran, seperti : Dinas Kehutanan Provinsi, Unit Manajemen (PBPH), dan Penyedia Barang/ Jasa.

Gambar 3.

Penanaman argoforestry jahe oleh KTH Sukamaju di Desa Tatari Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah. Mendorong geliat ekonomi masyarakat pasca pandemi

Gambar 4.

Kegiatan Internalisasi Indonesia's FOLU Net sink 2030 . Kontribusi pengelolaan hutan lestari mencapai Net Zero Emission (NZE) nasional

BAB 4. PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran

Pencapaian kinerja tidak hanya berhenti pada keberhasilan menyerap anggaran, namun juga manfaat yang dirasakan oleh pihak penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Bahwa penyelenggaraan program **"Pengelolaan Hutan Berkelanjutan"** oleh BPHL Wilayah XII Tahun 2022 telah memberi manfaat bagi masyarakat, dimana kegiatan pemulihan ekonomi nasional telah membantu mempertahankan daya beli dan perekonomian masyarakat menghadapi pandemi melalui fasilitasi pemasaran produk UMKM, kegiatan pengembangan tanaman agroforestry, bimbingan teknis dan workshop peningkatan kapasitas masyarakat dan berbagai komponen kegiatan pengembangan ekonomi produktif masyarakat dari program Forest Invesment Program (FIP) II merupakan *outcome* dari kinerja BPHL Wilayah XII Palu. Ketersediaaan data dan informasi pada gilirannya pun berkontribusi pada hadirnya kebijakan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan keseluruhan informasi dan data yang dijabarkan dalam Laporan Kinerja BPHL Wilayah XII Tahun 2022 ini, telah digambarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang dimiliki BPHL Wilayah XII yang dapat menjadi *feedback* bagi perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.